



Research Article

MEMAHAMI DINAMIKA PARTISIPASI KOMUNIKASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DI JAKARTA: SEBUAH KAJIAN FENOMENOLOGI

Ilman Heriyawan¹, Apsari Kumala Dewi², Lusia Putri Aprilia³

1. Universitas Mercbuana Yogyakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia
220710167@student.mercubuana-yogyakarta
2. Universitas Mercbuana Yogyakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia
220710180@student.mercubuana-yogyakarta
3. Universitas Mercbuana Yogyakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia
220710185@student.mercubuana-yogyakarta

Copyright © 2024 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 18, 2024

Revised : October 12, 2024

Accepted : October 27, 2024

Available online : December 06, 2024

How to Cite: Ilman Heriyawan, Apsari Kumala Dewi, & Lusia Putri Aprilia. (2024). Understanding the Dynamics of Political Communication Participation of Chinese Ethnic Groups in Jakarta: A Phenomenological Study. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(6), 400-417. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i6.45>

Understanding the Dynamics of Political Communication Participation of Chinese Ethnic Groups in Jakarta: A Phenomenological Study

Abstract. This study aims to understand the dynamics of political communication participation among the Chinese ethnic community in Jakarta through a qualitative phenomenological approach. Utilizing semistructured in-depth interviews, this research explores the subjective experiences of

Chinese individuals in the context of political participation. Participants were selected using purposive sampling techniques, comprising individuals aged 18 and above who have resided in Jakarta for at least 5 years and are actively involved in political activities. The collected data were analyzed using thematic analysis techniques to identify key themes emerging from the participants' experiences. The findings reveal that political communication participation among the Chinese ethnic community is influenced by social, cultural, and historical factors and faces various challenges related to stereotypes and discrimination. This study provides significant contributions to the literature on political participation of ethnic minorities in Indonesia and offers practical insights for policymakers to enhance political inclusivity.

Keywords: Political participation, political communication, Chinese ethnic community, Jakarta, phenomenology.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta melalui pendekatan fenomenologis kualitatif. Dengan menggunakan wawancara mendalam semiterstruktur, penelitian ini menggali pengalaman subjektif individu etnis Tionghoa dalam konteks partisipasi politik. Partisipan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, terdiri dari individu berusia 18 tahun ke atas yang berdomisili di Jakarta selama minimal 5 tahun dan aktif dalam kegiatan politik. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari pengalaman partisipan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah, serta menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan stereotip dan diskriminasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur mengenai partisipasi politik etnis minoritas di Indonesia dan memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan inklusivitas politik

Kata Kunci: Partisipasi politik, komunikasi politik, etnis Tionghoa, Jakarta, fenomenologi.

PENDAHULUAN

Partisipasi komunikasi politik merupakan elemen kunci dalam proses demokratisasi suatu negara. Di Indonesia, komunitas Tionghoa telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat, namun partisipasi politik mereka seringkali dilihat melalui lensa historis yang kompleks dan penuh tantangan. Di Jakarta, sebagai ibu kota negara dan pusat politik, dinamika komunikasi politik etnis Tionghoa menjadi fenomena menarik yang belum banyak diteliti secara mendalam. Mengingat pentingnya keterlibatan semua kelompok etnis dalam proses politik, pemahaman yang lebih dalam mengenai partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta sangatlah penting.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman dan persepsi individu etnis Tionghoa di Jakarta terkait partisipasi komunikasi politik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi komunikasi politik mereka, serta menjelaskan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh etnis Tionghoa dalam berpartisipasi dalam komunikasi politik di Jakarta. Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama: bagaimana pengalaman individu etnis Tionghoa di Jakarta dalam berpartisipasi dalam komunikasi politik, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi komunikasi politik mereka, dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh etnis Tionghoa dalam partisipasi komunikasi politik di Jakarta.

Studi ini memiliki signifikansi akademis dan praktis, diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai partisipasi politik etnis minoritas di

Indonesia, khususnya etnis Tionghoa, serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan aktivis politik untuk meningkatkan inklusivitas dalam komunikasi politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan di Jakarta, kota dengan populasi etnis Tionghoa yang signifikan dan pusat kegiatan politik Indonesia, yang menawarkan konteks unik untuk mempelajari dinamika partisipasi politik karena keberagaman etnis dan kompleksitas politiknya. Penelitian ini dibatasi pada individu etnis Tionghoa.

Penjelasan populasi penduduk etnis tionghoa di Jakarta dari data bps dan pemetaan di setiap daerah seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan juga Jakarta Barat. Sejak indonesia merdeka, komunitas Tionghoa telah diakui sebagai bagian integral dari keberagaman nasional, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga mereka telah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Berdasarkan data dari sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, DKI Jakarta menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah penduduk suku China terbanyak, mencapai 632.372 jiwa. Penduduk yang termasuk suku China sesuai dengan sensus penduduk adalah mereka yang menyakini dan mengakui diri mereka sebagai suku Tionghoa. Jakarta dikenal dengan kawasan pecinaan terbanyak di Indonesia.

Kawasan pecinaan yang ada di Jakarta dapat ditemukan di Pecenongan, Glodok, Pasar baru, dan Kelapa Gading. Kawasan pecinaan merujuk pada sebuah wilayah yang mayoritas penghuninya adalah orang China atau Tionghoa. Berdasarkan data dari BPS, terdapat variasi persentase populasi etnis Tionghoa di seluruh wilayah Jakarta. Persentase tertinggi terdapat di Jakarta Pusat sejumlah (13.34%), diikuti oleh Jakarta Utara (5.41%), Jakarta Barat (5.03%), dan Jakarta Selatan (4.78%). Persentase terendah terdapat di Jakarta Timur (2.53).

Distribusi populasi etnis Tionghoa di Jakarta menunjukkan pola yang tidak merata.² Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sejarah migrasi, ekonomi, dan budaya. Jakarta Pusat, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, memiliki daya tarik bagi etnis Tionghoa untuk menetap dan bekerja. Di sisi lain, Jakarta Timur, yang merupakan wilayah yang lebih baru berkembang, memiliki persentase etnis Tionghoa yang lebih rendah. Tionghoa yang berdomisili di Jakarta dan aktif atau memiliki pengalaman dalam komunikasi politik, serta tidak mencakup etnis Tionghoa di wilayah lain atau mereka yang tidak aktif dalam politik.

Komunikasi politik didefinisikan sebagai interaksi dan pertukaran informasi terkait politik antara individu, kelompok, atau lembaga, partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik, dan fenomenologi sebagai pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu berdasarkan perspektif mereka sendiri. Penelitian ini akan memfokuskan pada pengalaman subjektif individu etnis Tionghoa di Jakarta dalam konteks komunikasi politik, mencakup wawancara mendalam dan analisis fenomenologis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang partisipasi politik mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman subjektif individu etnis Tionghoa dalam partisipasi komunikasi politik di Jakarta.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka dalam konteks politik. Metodologi penelitian akan mencakup wawancara mendalam dengan individu etnis Tionghoa yang aktif dalam komunikasi politik, baik sebagai peserta aktif dalam kegiatan politik, anggota partai, atau pemilih yang memiliki minat dan keterlibatan dalam diskusi politik.

Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dan eksplorasi mendalam mengenai tema-tema yang muncul selama proses penelitian. Selain itu, penelitian ini juga akan mengumpulkan data sekunder dari literatur, dokumen, dan sumber-sumber lain yang relevan untuk memberikan konteks tambahan dan memperkuat temuan dari wawancara. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan identifikasi tema-tema utama dan pola-pola dalam data yang mencerminkan pengalaman dan persepsi individu.

Analisis ini akan membantu mengungkap dinamika partisipasi komunikasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tantangan yang dihadapi oleh etnis Tionghoa di Jakarta. Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusi teoritisnya dalam bidang komunikasi politik dan studi etnis minoritas, tetapi juga pada implikasi praktisnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat lainnya dalam merancang strategi dan program yang lebih inklusif dan efektif untuk meningkatkan partisipasi politik etnis minoritas.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya memperkuat demokrasi dan inklusivitas politik di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana etnis Tionghoa di Jakarta berpartisipasi dalam komunikasi politik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka, serta tantangan yang mereka hadapi. Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap makna mendalam di balik partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa dan memberikan kontribusi signifikan bagi literatur akademis serta praktik kebijakan di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif untuk memahami pengalaman subjektif individu etnis Tionghoa dalam partisipasi komunikasi politik di Jakarta. Sedangkan menurut Sugiyono (2019:18 n.d.) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Pendekatan fenomenologis dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna mendalam yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka dalam

konteks politik. Penelitian dilakukan di Jakarta, Sebutan fenomenologis menurut Alfred Schutz (1967 n.d.) berarti studi tentang cara dimana fenomena hal-hal yang kita sadari muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca indera kita.

Fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah ini dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna, suatu hal yang semula yang terjadi di dalam kesadaran individual kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaranibu kota Indonesia yang merupakan pusat politik dan memiliki populasi etnis Tionghoa yang signifikan. Jakarta menawarkan konteks yang unik dan beragam untuk mempelajari dinamika partisipasi politik etnis Tionghoa.

Partisipan dalam penelitian ini adalah individu etnis Tionghoa yang berdomisili di Jakarta dan aktif atau memiliki pengalaman dalam komunikasi politik. Kriteria inklusi partisipan meliputi: berusia 18 tahun ke atas, berdomisili di Jakarta selama minimal 5 tahun, dan aktif dalam kegiatan politik, baik sebagai anggota partai, peserta kampanye, atau aktif dalam diskusi politik. Pemilihan partisipan dilakukan melalui teknik purposive sampling untuk memastikan mereka memiliki pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Jumlah partisipan yang diharapkan adalah antara 10 hingga 15 orang, tergantung pada tingkat kejenuhan data yang diperoleh. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur.

Wawancara semiterstruktur dipilih untuk memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi topik-topik yang muncul selama proses wawancara, sambil tetap mengikuti panduan wawancara yang telah disiapkan. Setiap wawancara berlangsung antara 60 hingga 90 menit dan direkam dengan izin partisipan untuk keperluan transkripsi dan analisis lebih lanjut. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara yang disusun berdasarkan tujuan dan pertanyaan penelitian. Panduan wawancara mencakup pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh partisipan terhadap partisipasi komunikasi politik mereka. Data yang terkumpul dari wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis data meliputi beberapa tahap: transkripsi wawancara secara verbatim.

pengkodean awal untuk mengidentifikasi kode awal yang mencerminkan tema-tema yang muncul, pengelompokan kode awal menjadi tema-tema yang lebih luas dan relevan dengan pertanyaan penelitian, peninjauan dan penyempurnaan tema, serta penulisan laporan yang mencerminkan pengalaman dan persepsi partisipan terhadap partisipasi komunikasi politik mereka. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa langkah diambil, termasuk triangulasi data. Menurut Sugiyono (2015:83 n.d.) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. pengecekan partisipan, dan diskusi dengan rekan sejawat. Triangulasi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti literatur dan dokumen terkait, untuk memperkuat temuan dari wawancara.

Pengecekan partisipan melibatkan partisipan dalam proses verifikasi temuan untuk memastikan interpretasi peneliti akurat dan sesuai dengan pengalaman

partisipan. Diskusi dengan rekan sejawat dilakukan untuk memperoleh masukan dan perspektif lain yang dapat memperkaya analisis data. Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan tertulis dari partisipan sebelum wawancara dilakukan, menjaga kerahasiaan identitas partisipan, dan memastikan bahwa partisipan dapat menarik diri dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi. Seluruh data yang diperoleh disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian ini.

KAJIAN TEORITIS

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah konsep sentral dalam ilmu politik dan sosiologi, namun definisinya bervariasi tergantung pada sudut pandang ahli yang menelitinya. Secara umum, partisipasi politik mengacu pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

Menurut Herbert McClosky, (McClosky, 1984) seorang ahli terkemuka dalam bidang partisipasi politik, mendefinisikannya sebagai kegiatan sukarela warga negara dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung melalui pemilihan umum maupun tidak langsung melalui keanggotaan dalam partai politik atau kelompok kepentingan. McClosky juga menekankan pentingnya partisipasi dalam pembentukan kebijakan umum, misalnya melalui partisipasi dalam dengar pendapat publik, petisi, atau kampanye advokasi.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, (Samuel Huntington, 1990) dua ilmuwan politik terkemuka, menawarkan definisi yang lebih luas. Mereka memandang partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu atau kelompok untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Definisi ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, mulai dari yang konvensional seperti memilih dalam pemilu hingga yang non-konvensional seperti demonstrasi atau pemogokan.

Menurut Keith Faulks, (Faulks, 2010) seorang sosiolog politik, menekankan aspek keterlibatan aktif dalam definisinya. Menurut Faulks, partisipasi politik tidak hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi juga mencakup keterlibatan kelompok dalam proses pemerintahan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan oposisi terhadap pemerintah.

Selain tiga ahli di atas, masih banyak ahli lain yang memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep partisipasi politik. Misalnya, Sidney Verba dan Norman Nie mengembangkan tipologi partisipasi politik yang membedakan antara partisipasi aktif (misalnya, menjadi sukarelawan kampanye) dan partisipasi pasif (misalnya, menonton debat politik di televisi). Sementara itu, Lester Milbrath mengidentifikasi berbagai mode partisipasi politik, mulai dari yang paling sederhana seperti memberikan suara dalam pemilu hingga yang paling kompleks seperti mencalonkan diri dalam jabatan publik.

Bentuk-bentuk partisipasi politik juga sangat beragam. Selain yang telah disebutkan di atas, contoh lain termasuk menulis surat kepada pejabat publik, menghadiri rapat umum, bergabung dengan kelompok advokasi, atau bahkan

menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat politik. Penting untuk dicatat bahwa partisipasi politik tidak selalu bersifat formal atau terorganisir. Diskusi politik informal di antara teman atau keluarga juga merupakan bentuk partisipasi politik yang penting.

Manfaat partisipasi politik juga tidak dapat diabaikan. Partisipasi politik yang luas dapat meningkatkan legitimasi pemerintah, memperbaiki kualitas kebijakan publik, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, partisipasi politik juga dapat memberdayakan individu dan kelompok, meningkatkan rasa memiliki terhadap komunitas, dan memperkuat kohesi sosial.

Partisipasi politik etnis Tionghoa di Jakarta tidak hanya dilihat sebagai tindakan individu untuk mempengaruhi keputusan politik, tetapi juga sebagai sebuah proses komunikasi yang kompleks dan dinamis. Partisipasi politik dalam konteks ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, yang digunakan oleh etnis Tionghoa untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka, membangun jaringan sosial dan politik, serta berinteraksi dengan kelompok etnis lain dan pemerintah.

Hal ini menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif etnis Tionghoa dalam berpartisipasi dalam politik. Bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri sebagai warga negara Indonesia, bagaimana mereka merasakan hambatan dan peluang dalam berpartisipasi, serta bagaimana mereka membangun makna dan identitas melalui komunikasi politik, menjadi fokus utama dalam kajian ini.

Selain itu, kajian ini juga menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti sejarah, budaya, dan struktur sosial mempengaruhi partisipasi politik etnis Tionghoa. Misalnya, pengalaman diskriminasi dan marginalisasi di masa lalu dapat membentuk cara etnis Tionghoa memandang politik dan memilih bentuk partisipasi yang mereka anggap aman dan efektif.

Dalam konteks ini, partisipasi politik etnis Tionghoa tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai sebuah proses yang terus berkembang dan berubah seiring dengan dinamika sosial dan politik yang terjadi. Kajian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana etnis Tionghoa di Jakarta menggunakan komunikasi untuk membangun identitas politik mereka, mengatasi hambatan, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik yang lebih luas.

Menurut Herbert McClosky (McClosky, 1984 : 225) terdapat tiga indikator dalam partisipasi politik indikator ini juga menjadi parameter berhasil atau tidak nya partisipasi politik yang baik dapat tercipta di suatu wilayah yaitu Berupa kegiatan sukarela, dilakukan oleh warga negara, warga negara terlibat dalam proses politik.

1. Berupa Kegiatan Sukarela

Partisipasi politik bagi etnis Tionghoa di Jakarta bukan sekadar tindakan sukarela yang normatif, melainkan juga wadah untuk menegaskan identitas mereka sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai komunitas Tionghoa yang memiliki sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang unik.

- Mencari Ruang Ekspresi yang Beragam: Etnis Tionghoa tidak hanya mengandalkan jalur formal seperti partai politik atau organisasi massa, tetapi juga

memanfaatkan ruang-ruang informal seperti komunitas seni, budaya, dan keagamaan untuk mengartikulasikan aspirasi politik mereka. Festival budaya Tionghoa, misalnya, seringkali menjadi ajang untuk menyampaikan pesan-pesan sosial dan politik yang relevan dengan kehidupan komunitas Tionghoa.

- Mengartikulasikan Kepentingan yang Beragam: Partisipasi politik etnis Tionghoa tidak hanya terbatas pada isu-isu yang secara langsung berkaitan dengan komunitas Tionghoa, seperti diskriminasi dan pengakuan hak-hak minoritas. Mereka juga aktif menyuarakan pandangan mereka tentang isu-isu nasional yang lebih luas, seperti korupsi, lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- Membangun Jembatan Komunikasi yang Inklusif: Etnis Tionghoa tidak hanya berdialog dengan sesama anggota komunitas Tionghoa, tetapi juga aktif membangun jaringan komunikasi dengan kelompok etnis lain, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah. Mereka menyadari bahwa kolaborasi dan dialog lintas budaya sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

2. Dilakukan oleh Warga Negara

Etnis Tionghoa di Jakarta tidak lagi merasa terpinggirkan atau apatis terhadap politik. Mereka adalah warga negara yang aktif, kritis, dan berdaya, yang secara sadar menggunakan hak-hak politik mereka untuk mempengaruhi perubahan sosial dan politik.

- Meningkatkan Kesadaran Politik melalui Pendidikan dan Media: Etnis Tionghoa tidak hanya mengandalkan media massa arus utama untuk mendapatkan informasi politik. Mereka juga aktif mencari informasi dari sumber-sumber alternatif, seperti media sosial, jurnal akademik, dan forum diskusi online. Selain itu, mereka juga mendorong pendidikan politik di kalangan generasi muda Tionghoa agar lebih memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
- Mengkritisi Kebijakan Publik dengan Berbagai Cara: Etnis Tionghoa tidak segan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik yang mereka anggap tidak adil, tidak efektif, atau merugikan kepentingan masyarakat. Kritik ini bisa disampaikan melalui berbagai cara, mulai dari menulis surat pembaca atau opini di media massa, hingga mengadakan diskusi publik atau demonstrasi damai.
- Menuntut Akuntabilitas melalui Advokasi dan Pemantauan: Etnis Tionghoa tidak hanya puas dengan menyampaikan kritik, tetapi juga aktif melakukan advokasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Mereka bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga independen untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka dan kebijakan yang mereka buat.

3. Warga Negara Terlibat dalam Proses Politik

Etnis Tionghoa di Jakarta memiliki visi yang jelas tentang partisipasi politik yang ideal: sebuah proses yang inklusif, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi; partisipatif, di mana warga negara tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan; dan demokratis, di mana keputusan politik diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

- Menolak Diskriminasi dan Menggalang Solidaritas: Etnis Tionghoa tidak hanya berjuang untuk menghapus diskriminasi terhadap komunitas Tionghoa, tetapi juga terhadap semua kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. Mereka aktif menggalang solidaritas dengan kelompok-kelompok lain yang juga memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial.
- Membangun Koalisi Lintas Identitas: Etnis Tionghoa tidak hanya bekerja sama dengan sesama anggota komunitas Tionghoa, tetapi juga membangun koalisi dengan kelompok etnis lain, kelompok agama, organisasi buruh, kelompok perempuan, dan kelompok-kelompok lain yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.
- Mendorong Dialog dan Kolaborasi: Etnis Tionghoa percaya bahwa dialog dan kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Mereka aktif memfasilitasi dialog antara pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai masalah sosial dan politik.

Etnis Tionghoa

Partisipasi Etnis Tionghoa, atau sering disebut juga sebagai orang Tionghoa, adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan Tiongkok, baik melalui leluhur, budaya, bahasa, atau kewarganegaraan. Istilah ini memiliki beberapa makna, tergantung pada konteksnya.

Pertama, istilah Tionghoa bisa merujuk pada penduduk Republik Rakyat Tiongkok, terutama yang tinggal di Tiongkok Daratan. Mereka adalah bagian dari masyarakat Tiongkok yang sangat beragam, dengan mayoritas beretnis Han. Namun, terdapat juga 55 kelompok etnis minoritas lainnya yang diakui secara resmi, seperti Zhuang, Manchu, Hui, Miao, Uyghur, Tibet, dan sebagainya. Masing-masing kelompok etnis ini memiliki bahasa, budaya, dan tradisi yang unik, menambah kekayaan warisan Tiongkok.

Kedua, istilah Tionghoa juga digunakan untuk menyebut orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di luar Tiongkok, yang sering disebut sebagai Hua Ren atau orang Tionghoa perantauan. Mereka tersebar di berbagai belahan dunia, membentuk komunitas yang dinamis dan berpengaruh di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, dan Australia. Di negara-negara ini, mereka telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan politik hingga budaya dan pendidikan.

Ketiga, dalam konteks Tiongkok sendiri, istilah Tionghoa kadang-kadang digunakan secara luas untuk mencakup semua kelompok etnis di negara tersebut, meskipun hal ini tidak sepenuhnya akurat. Penting untuk diingat bahwa Tiongkok adalah rumah bagi 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi, masing-masing dengan identitas dan karakteristiknya sendiri.

Sejarah dan Kontribusi Etnis Tionghoa di Indonesia, Orang-orang Tionghoa telah memiliki sejarah panjang dan kaya di Indonesia. Kehadiran mereka dapat ditelusuri kembali hingga berabad-abad yang lalu, ketika mereka datang melalui jalur perdagangan dan membawa serta budaya, bahasa, dan keahlian mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka telah berasimilasi dengan masyarakat Indonesia,

menciptakan budaya peranakan yang unik, perpaduan antara budaya Tionghoa dan lokal.

Kontribusi etnis Tionghoa bagi Indonesia sangatlah signifikan dan beragam. Dalam bidang ekonomi, pengusaha Tionghoa telah membangun berbagai bisnis sukses, mulai dari usaha kecil dan menengah (UKM) hingga konglomerasi besar yang beroperasi di berbagai sektor, seperti perbankan, manufaktur, properti, dan ritel. Beberapa tokoh bisnis Tionghoa-Indonesia yang terkenal antara lain Mochtar Riady (pendiri Lippo Group), Eka Tjipta Widjaja (pendiri Sinar Mas Group), dan Sukanto Tanoto (pendiri Royal Golden Eagle).

Dalam bidang kuliner, masakan Tionghoa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari khazanah kuliner Indonesia. Hidangan seperti bakmi, bakso, lumpia, kwetiau, dan berbagai jenis dim sum telah menjadi favorit masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Restoran Tionghoa, baik yang menyajikan hidangan otentik maupun yang telah mengalami adaptasi dengan cita rasa lokal, dapat ditemukan di seluruh penjuru negeri.

Dalam bidang budaya, etnis Tionghoa telah memperkaya tradisi dan perayaan di Indonesia. Perayaan Imlek dan Cap Go Meh, misalnya, telah menjadi bagian integral dari kalender budaya Indonesia. Kesenian Tionghoa seperti barongsai, liong, dan wayang Potehi juga telah mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Selain itu, bahasa Mandarin dan dialek-dialek Tionghoa lainnya digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan populasi Tionghoa yang besar.

Etnis Tionghoa di Indonesia memiliki perjalanan panjang dan penuh liku dalam keterlibatannya di dunia politik. Dari masa penjajahan Belanda hingga era reformasi, peran dan kontribusi mereka terus berkembang, mencerminkan dinamika sosial dan politik yang kompleks di Indonesia.

Masa Penjajahan dan Awal Kemerdekaan, Pada masa penjajahan Belanda, etnis Tionghoa memiliki peran penting dalam perekonomian, tetapi partisipasi politik mereka terbatas. Beberapa tokoh Tionghoa seperti Liem Koen Hian dan Ong Eng Die turut aktif dalam pergerakan nasional, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, etnis Tionghoa mendapatkan hak kewarganegaraan dan mulai terlibat dalam politik, meskipun masih menghadapi diskriminasi dan prasangka.

Orde Baru dan Kebijakan Asimilasi, Era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menjadi masa sulit bagi etnis Tionghoa. Kebijakan asimilasi yang ketat diterapkan, melarang penggunaan bahasa dan budaya Tionghoa, serta membatasi partisipasi politik mereka. Banyak tokoh Tionghoa disingkirkan dari panggung politik, dan etnis Tionghoa secara umum didorong untuk berbaur dengan masyarakat pribumi. Namun, beberapa individu Tionghoa berhasil menduduki posisi penting di pemerintahan, seperti Bob Hasan dan Kwik Kian Gie, meskipun harus menghadapi berbagai hambatan.

Era Reformasi dan Kebangkitan Politik, Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka babak baru bagi partisipasi politik etnis Tionghoa. Kebijakan diskriminatif dihapuskan, dan kebebasan berekspresi serta berorganisasi dipulihkan. Sejak saat itu, semakin banyak tokoh Tionghoa yang aktif dalam partai politik,

mencalonkan diri dalam pemilihan umum, dan menduduki jabatan publik. Beberapa contoh tokoh Tionghoa yang menonjol di era reformasi antara lain Kwik Kian Gie (mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi), Mari Elka Pangestu (mantan Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata), dan Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta).

Partisipasi Politik Saat Ini, Saat ini, etnis Tionghoa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap politik Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai partai politik, baik sebagai anggota maupun pemimpin. Beberapa partai politik bahkan memiliki basis pendukung yang signifikan dari kalangan Tionghoa. Di parlemen, terdapat sejumlah anggota legislatif dari etnis Tionghoa yang mewakili berbagai daerah pemilihan. Selain itu, beberapa tokoh Tionghoa juga menjabat sebagai kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota.

Tantangan dan Harapan, Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan, etnis Tionghoa masih menghadapi tantangan dalam partisipasi politik. Sentimen anti-Tionghoa masih dapat muncul dalam diskursus politik, terutama selama masa-masa ketegangan sosial atau ekonomi. Selain itu, isu representasi politik yang adil dan merata bagi semua kelompok etnis di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diperjuangkan.

Namun, secara keseluruhan, etnis Tionghoa telah berhasil membangun kehadiran politik yang kuat di Indonesia. Kontribusi mereka dalam pembangunan bangsa semakin diakui, dan peran mereka dalam memperkaya keberagaman politik Indonesia tidak dapat dipungkiri. Ke depan, diharapkan partisipasi politik etnis Tionghoa akan terus meningkat, seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi dan semakin kuatnya semangat inklusivitas di Indonesia.

Fenomenologi

Alfred Schutz, (Schutz, 1976) seorang sosiolog dan filsuf sosial, mengembangkan pendekatan fenomenologis yang unik untuk memahami bagaimana individu mengkonstruksi makna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan ini menyoroti beberapa indikator kunci yang mencerminkan bagaimana pengalaman subjektif, intersubjektivitas, dan pengetahuan bersama membentuk pemahaman kita tentang dunia sosial, kali ini saya akan menjabarkan apa saja indikator-indikator fenomenologi meneuru Alfred Schutz.

1. Pengalaman Subjektif:

- **Wawancara Mendalam:** Melakukan wawancara mendalam dengan individu etnis Tionghoa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, usia, dan afiliasi politik. Menggali pengalaman mereka dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, demonstrasi, atau kegiatan politik lainnya. Bagaimana mereka memandang peran mereka dalam politik? Apakah mereka merasa suara mereka didengar?
- **Narasi Pribadi:** Mengumpulkan cerita-cerita pribadi tentang pengalaman diskriminasi atau prasangka yang mungkin mereka hadapi. Misalnya, bagaimana mereka merespons stereotip negatif tentang etnis Tionghoa dalam politik? Apakah pengalaman ini memengaruhi motivasi mereka untuk berpartisipasi?

- **Refleksi Diri:** Memfasilitasi sesi refleksi diri di mana partisipan diajak untuk merenungkan nilai-nilai dan keyakinan yang mendorong mereka untuk terlibat dalam politik. Apakah mereka merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi? Bagaimana identitas etnis mereka memengaruhi pandangan politik mereka?

2. Tipifikasi:

- **Identifikasi Pola:** Menganalisis bagaimana individu etnis Tionghoa mengkategorikan diri mereka sendiri dan orang lain dalam konteks politik. Apakah mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari kelompok etnis Tionghoa yang lebih besar atau sebagai individu dengan pandangan politik yang independen?
- **Stereotipe dan Prasangka:** Mengidentifikasi stereotip umum tentang etnis Tionghoa dalam politik, seperti anggapan bahwa mereka hanya peduli pada kepentingan bisnis atau lebih loyal pada Tiongkok daripada Indonesia. Bagaimana stereotip ini memengaruhi partisipasi politik mereka? Apakah mereka berusaha untuk melawan stereotip ini atau justru menghindarinya?
- **Pergeseran Makna:** Menelusuri bagaimana makna partisipasi politik bagi etnis Tionghoa telah berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, apakah reformasi politik pasca-1998 telah membuka lebih banyak ruang bagi partisipasi mereka? Bagaimana peristiwa politik tertentu, seperti kerusuhan Mei 1998, memengaruhi persepsi mereka tentang politik?

3. Stok Pengetahuan:

- **Sejarah dan Budaya:** Memahami bagaimana sejarah panjang etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk masa-masa diskriminasi dan kekerasan, membentuk pandangan mereka tentang politik. Bagaimana mereka memaknai peristiwa sejarah seperti pembatasan hak politik di masa Orde Baru?
- **Pengaruh Keluarga dan Komunitas:** Menyelidiki bagaimana nilai-nilai keluarga dan komunitas, seperti pentingnya pendidikan, kerja keras, dan harmoni sosial, memengaruhi partisipasi politik etnis Tionghoa. Apakah keluarga mereka mendorong atau justru melarang keterlibatan dalam politik?
- **Akses Informasi:** Menganalisis bagaimana etnis Tionghoa mengakses informasi politik, baik melalui media arus utama, media sosial, atau jaringan komunitas. Apakah mereka merasa representasi mereka di media akurat? Bagaimana mereka menggunakan informasi ini untuk membentuk pandangan politik mereka?

4. Intersubjektivitas:

- **Dialog dan Diskusi:** Mengamati bagaimana individu etnis Tionghoa berinteraksi dengan kelompok etnis lain dalam forum politik, seperti diskusi publik, seminar, atau lokakarya. Apakah mereka merasa didengar dan dihargai? Apakah ada kesalahpahaman atau konflik yang muncul?
- **Jaringan dan Organisasi:** Memetakan jaringan sosial dan organisasi politik yang melibatkan etnis Tionghoa. Bagaimana jaringan ini memfasilitasi partisipasi politik mereka? Apakah mereka bergabung dengan partai politik tertentu atau lebih memilih untuk terlibat dalam organisasi masyarakat sipil?

- **Representasi Media:** Menganalisis bagaimana media arus utama dan media sosial menggambarkan partisipasi politik etnis Tionghoa. Apakah representasi ini seimbang dan akurat? Bagaimana individu etnis Tionghoa merespons representasi ini?

5. Dunia Kehidupan Sehari-hari (Lifeworld):

- **Observasi Partisipan:** Melakukan observasi partisipan dalam kegiatan politik yang melibatkan etnis Tionghoa, seperti kampanye politik, pertemuan komunitas, atau diskusi informal. Bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain? Apa topik yang mereka diskusikan?
- **Analisis Wacana:** Menganalisis bahasa dan simbol yang digunakan oleh etnis Tionghoa dalam komunikasi politik mereka. Apakah ada istilah atau frasa tertentu yang memiliki makna khusus bagi mereka? Bagaimana mereka menggunakan bahasa untuk mengekspresikan identitas dan aspirasi politik mereka?
- **Konteks Sosial dan Politik:** Mempertimbangkan konteks sosial dan politik yang lebih luas di Jakarta, seperti kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa, hubungan antaretnis, dan iklim politik secara keseluruhan. Bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi partisipasi politik etnis Tionghoa?

Dengan menggunakan indikator-indikator ini secara komprehensif, penelitian fenomenologis dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan bernuansa tentang dinamika partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta. Pendekatan ini tidak hanya akan mengungkapkan pengalaman subjektif dan makna yang mereka berikan pada partisipasi politik mereka, tetapi juga akan mengungkap bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang kompleks saling berinteraksi untuk membentuk keterlibatan mereka dalam proses politik.

RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini mengungkapkan bahwa etnis Tionghoa di Jakarta memiliki pengalaman dan pandangan yang beragam mengenai partisipasi komunikasi politik. Beberapa responden merasa bahwa partisipasi mereka masih terbatas dan terkendala oleh stereotip negatif serta diskriminasi. Namun, ada juga responden yang merasa bahwa mereka telah berhasil mengatasi hambatan tersebut dan aktif terlibat dalam politik, baik melalui jalur formal maupun informal.

Salah satu responden, Jesika (22 tahun), seorang mahasiswa, menyoroti peran ganda media sosial dalam partisipasi politik etnis Tionghoa. Di satu sisi, media sosial menjadi sarana yang ampuh untuk mendapatkan informasi, berjejaring, dan menyuarakan aspirasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa media sosial telah membuka ruang baru bagi partisipasi politik kelompok minoritas. Namun, di sisi lain, media sosial juga rentan terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi. Jesika sendiri pernah mengalami ujaran kebencian terkait etnis Tionghoa di media sosial, tetapi ia memilih untuk tidak terpancing emosi dan fokus pada klarifikasi dan edukasi. Sikap ini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa tidak hanya menjadi korban pasif dari diskriminasi online, tetapi juga agen aktif yang berusaha melawan narasi negatif dan membangun dialog yang konstruktif.

Sementara itu, Angel (21 tahun), juga seorang mahasiswa dan aktif di dunia politik praktis, berbagi pengalamannya menghadapi diskriminasi dan prasangka karena latar belakang etnisnya. Pengalaman Angel ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh etnis Tionghoa dalam politik, di mana stereotip negatif dan prasangka masih mengakar di sebagian masyarakat. Meskipun demikian, ia berhasil membuktikan kemampuannya sebagai wakil rakyat melalui kinerja dan dedikasinya. Keberhasilan Angel menunjukkan bahwa etnis Tionghoa memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam politik, dan bahwa diskriminasi tidak harus menjadi penghalang bagi mereka untuk mencapai kesuksesan. Angel juga optimis dengan meningkatnya partisipasi politik generasi muda Tionghoa, meskipun tantangan seperti kurangnya representasi politik dan stereotip negatif masih perlu diatasi. Optimisme Angel ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan adanya peningkatan partisipasi politik generasi muda Tionghoa di Indonesia.

Temuan penelitian ini memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta. Di satu sisi, terdapat optimisme dan semangat partisipasi yang tinggi, terutama di kalangan generasi muda. Namun, di sisi lain, tantangan seperti stereotip negatif, diskriminasi, dan kurangnya representasi politik masih membayangi. Untuk mencapai partisipasi politik yang lebih inklusif dan setara, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan budaya. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan seperti representasi politik yang terbatas, stereotip negatif, dan diskriminasi masih membayangi partisipasi politik etnis Tionghoa.

1. Peran Media Sosial:

Media sosial telah menjadi *double-edged sword* (pedang bermata dua) bagi partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta. Di satu sisi, media sosial memberdayakan individu seperti Jesika (22 tahun) untuk mendapatkan informasi, berjejaring, dan menyuarakan aspirasi mereka. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi medan pertempuran bagi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi. Pengalaman Jesika yang pernah menjadi sasaran ujaran kebencian menunjukkan bahwa meskipun media sosial membuka ruang partisipasi, namun tetap ada risiko yang perlu diwaspadai. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Anderson dan Pempek (2005) yang menemukan bahwa anonimitas dan kurangnya regulasi di media sosial dapat mempermudah penyebaran ujaran kebencian dan diskriminasi.

2. Diskriminasi dan Stereotip Negatif:

Pengalaman Angel (21 tahun) yang menghadapi diskriminasi dan prasangka karena latar belakang etnisnya menunjukkan bahwa stereotip negatif tentang etnis Tionghoa masih mengakar di sebagian masyarakat. Stereotip ini, seperti yang dijelaskan oleh Katz dan Braly (1933), dapat menjadi *self-fulfilling prophecy* (ramalan

yang terwujud dengan sendirinya) yang membatasi peluang dan partisipasi politik etnis Tionghoa. Namun, Angel berhasil mengatasi hambatan ini melalui kinerja dan dedikasinya, membuktikan bahwa stereotip tersebut tidak benar. Pengalaman Angel ini memberikan inspirasi bagi etnis Tionghoa lainnya untuk tidak menyerah pada stereotip dan terus berjuang untuk kesetaraan.

3. Partisipasi Politik Generasi Muda:

Meningkatnya partisipasi politik generasi muda Tionghoa, seperti yang ditunjukkan oleh optimisme Angel, merupakan perkembangan positif. Hal ini sejalan dengan penelitian Verba, Scholzman, dan Brady (1995) yang menemukan bahwa generasi muda cenderung lebih berpartisipasi dalam politik jika mereka merasa memiliki *political efficacy* (keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi proses politik). Namun, partisipasi generasi muda juga perlu diarahkan agar lebih efektif dan berdampak. Pendidikan politik yang komprehensif dan inklusif, seperti yang diusulkan oleh Freire (1970), dapat menjadi kunci untuk memberdayakan generasi muda Tionghoa agar menjadi agen perubahan yang positif.

4. Pentingnya Jaringan dan Solidaritas:

Jaringan sosial dan komunitas, baik yang bersifat formal maupun informal, memainkan peran penting dalam memobilisasi partisipasi politik etnis Tionghoa. Jaringan ini tidak hanya memberikan dukungan moral dan emosional, tetapi juga sumber daya, informasi, dan peluang untuk terlibat dalam politik. Putnam (2000) dalam bukunya "Bowling Alone" menekankan pentingnya modal sosial (*social capital*) dalam membangun masyarakat yang demokratis dan partisipatif.

5. Strategi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik:

Untuk meningkatkan partisipasi politik etnis Tionghoa di Jakarta, diperlukan pendekatan multi-faceted (banyak sisi) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendidikan politik yang inklusif dan komprehensif dapat meningkatkan kesadaran politik dan *political efficacy* etnis Tionghoa. Penguatan jaringan komunitas dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam politik. Peningkatan representasi politik etnis Tionghoa di berbagai tingkatan dapat memberikan teladan dan inspirasi bagi generasi muda. Advokasi dan kampanye publik dapat membantu melawan stereotip negatif dan diskriminasi. Pemanfaatan media sosial secara strategis dapat memperluas jangkauan suara etnis Tionghoa dan membangun solidaritas dengan kelompok lain.

Partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta adalah sebuah perjalanan yang masih terus berlangsung. Dengan memahami kompleksitas dan dinamika yang ada, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menciptakan ruang politik yang lebih inklusif, setara, dan demokratis bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang etnis mereka.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berhasil mengungkapkan pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh etnis Tionghoa terhadap

partisipasi politik mereka. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan efektif, serta memberikan inspirasi bagi penelitian lebih lanjut tentang partisipasi politik etnis minoritas di Indonesia.

Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang penting. Bagi pemerintah, temuan ini dapat menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi etnis Tionghoa. Bagi partai politik, temuan ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan menarik bagi pemilih Tionghoa. Bagi organisasi kemasyarakatan Tionghoa, temuan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat peran mereka dalam memobilisasi partisipasi politik anggota mereka.

Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah responden yang relatif kecil dan fokus pada wilayah Jakarta membatasi generalisasi temuan ini ke populasi Tionghoa yang lebih luas di Indonesia. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada partisipasi komunikasi politik, sehingga tidak mencakup aspek lain dari partisipasi politik, seperti partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil atau gerakan sosial. Ketiga, penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang perbedaan pengalaman dan pandangan antara generasi tua dan muda Tionghoa.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini dan memperluas pemahaman kita tentang partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan mencakup wilayah yang lebih luas. Penelitian juga dapat menggali lebih dalam tentang perbedaan pengalaman dan pandangan antara generasi tua dan muda Tionghoa, serta mengeksplorasi aspek lain dari partisipasi politik selain komunikasi politik.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berhasil mengungkapkan pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh etnis Tionghoa terhadap partisipasi politik mereka. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan efektif, serta memberikan inspirasi bagi penelitian lebih lanjut tentang partisipasi politik etnis minoritas di Indonesia.

Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang penting, temuan ini dapat menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi etnis Tionghoa. Bagi partai politik, temuan ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan menarik bagi pemilih Tionghoa. Bagi organisasi kemasyarakatan Tionghoa, temuan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat peran mereka dalam memobilisasi partisipasi politik anggota mereka.

Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah responden yang relatif kecil dan fokus pada wilayah Jakarta membatasi generalisasi temuan ini ke populasi Tionghoa yang lebih luas di Indonesia. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada partisipasi komunikasi politik, sehingga tidak mencakup aspek

lain dari partisipasi politik, seperti partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil atau gerakan sosial. Ketiga, penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang perbedaan pengalaman dan pandangan antara generasi tua dan muda Tionghoa.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini dan memperluas pemahaman kita tentang partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan mencakup wilayah yang lebih luas. Penelitian juga dapat menggali lebih dalam tentang perbedaan pengalaman dan pandangan antara generasi tua dan muda Tionghoa, serta mengeksplorasi aspek lain dari partisipasi politik selain komunikasi politik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan budaya. Meskipun ada kemajuan, tantangan seperti representasi politik yang terbatas, stereotip negatif, dan diskriminasi masih ada.

Penelitian ini menyoroti peran media sosial sebagai sarana pemberdayaan dan sekaligus medan penyebaran informasi yang salah dan kebencian. Diskriminasi dan stereotip negatif masih menjadi hambatan, tetapi ada optimisme dari generasi muda Tionghoa yang semakin terlibat dalam politik. Jaringan sosial dan komunitas juga berperan penting dalam memobilisasi partisipasi politik.

Untuk meningkatkan partisipasi politik etnis Tionghoa, diperlukan pendekatan multi-faceted yang melibatkan pendidikan politik inklusif, penguatan jaringan komunitas, peningkatan representasi politik, advokasi melawan stereotip, dan pemanfaatan media sosial secara strategis. Partisipasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta adalah sebuah perjalanan yang terus berlangsung. Dengan memahami kompleksitas dan dinamika yang ada, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk menciptakan ruang politik yang lebih inklusif, setara, dan demokratis bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang etnis mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, F. F., Hafiar, H., & Novianti, E. (2016). Perilaku Komunikasi Etnis Tionghoa Peranakan dalam Bisnis Keluarga (Studi Fenomenologi Mengenai Perilaku Komunikasi Etnis Tionghoa Peranakan dalam Bisnis Keluarga di Jakarta). *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 105–118. <http://neo-bis.trunojoyo.ac.id/komunikasi/article/view/1190>
- Budiyono, M. (2016). Media Sosial Dan Komunikasi Politik: Media Sosial Sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada Dki Jakarta 2017. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 47–62. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art4>
- Juditha, C. (2015). Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12(1), 87–104. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.445>
- Mienarto, V. C. (2016). Peran Politik Etnis Tionghoa: Strategi Komunikasi Politik Ketua RW 07 dalam Memimpin Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Solo. *Komunikasi Politik; Etnis Tionghoa; Mayoritas-Minoritas Program Studi Komunikasi FISKOM-UKSW*.

- Nurrohman, B., Mayrudin, Y. M., Astuti, D. S., & Maharani, R. (2023). Aktivismе Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten. *Journal of Political Issues*, 4(2), 137–151. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.81>
- Prasetyo, D. (2015). Persepsi Masyarakat Dki Jakarta Terhadap Figur Dan Komunikasi Politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 5(2), 5–17. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/8895/7224>
- Sinaga, R. S., Lestari, P., Lubis, K., & Yolanda, A. (2022). Transformasi Identitas Sosial Perempuan Tionghoa Indonesia Dari Komunikasi Sosial Ke Komunikasi Politik. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 6(1), 82. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v6i1.12612>
- Tayibnaris, R. G., & Aladdin, Y. (2023). Analisis Bibliometrika Politik Identitas Anies Baswedan Pada Studi Media Komunikasi. *COMMENTATE: Journal of Communication Management*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.37535/103004120234>
- Valiana, A., & Trisiana, A. (2016). Analisis Strategi Komunikasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemenangan Rudi Dan Purnomo Dalam Pilkada 2015 Kota Surakarta. *Jurnal Global Citizen*, 2(2), 12–27.
- Yudhatama, I. (2017). Komunikasi Politik dan Partisipasi Warga dalam Arena Perencanaan dan Penganggaran Dana Keistimewaan DIY. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(3), 205. <https://doi.org/10.31315/jik.v15i3.2172>
- Zainal, A. G., & Sarwoprasodjo, S. (2018). Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan (Studi Program “Bupati Ronda” di Kabupaten Lampung Tengah). *Journal Of Communication Studies*, 3(1), 54–66.